

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 Nomor : 689 TAHUN 2005
 Tanggal : 6 September 2005

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
1	Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.	1 Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah;	1 Pembinaan serta bantuan prasarana dan sarana kepada lembaga pendidikan pra sekolah;	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI, SLTP dan MTs;	APBD I/ APBD II & APBN	DINAS PENDIDIKAN, Depag
			2 Diklat bagi kepala dan guru-guru lembaga pendidikan pra sekolah;	2 Menurunnya angka putus sekolah;	APBD I/II	
			3 Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu;	3 Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat;	APBD I/II	
			4 Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan;	4 Meningkatnya Angka siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan dan jenjang yang lebih tinggi	APBD I/II	
			5 Diklat bagi kepala dan guru-guru lembaga pendidikan sekolah dasar;	5 Tertuntaskannya Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 (sembilan) tahun	APBD I/II	
			6 Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah;	6 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan pra sekolah dan sekolah dasar;	APBD I/II, APBN/ swadaya masyarakat	
			7 Penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan MBS yang didukung pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal;	7 Meningkatnya bantuan bagi keluarga kurang mampu.	APBD I/ APBD II & APBN	
			8 Pengembangan kemitraan dengan stakeholder pendidikan			
			9 Penggabungan sekolah dasar yang didukung dengan pemerataan kualitas tenaga kependidikan			
			10 Pengembangan kepastakaan sekolah;			
			11 Peningkatan tertib administrasi pendidikan			
2	Program Pendidikan Menengah;	2 Program Pendidikan Menengah;	1 Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan;	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA;	APBD I & II	DINAS PENDIDIKAN
			2 Diklat bagi kepala dan guru sekolah menengah dan kejuruan	2 Menurunnya Angka Putus Sekolah;	APBD I & II	
			3 Peningkatan manajemen berbasis sekolah;	3 Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat;	APBD II	
			4 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan MBS yang didukung dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal	4 Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah-sekolah menengah kejuruan;	APBD II	
			5 Pengembangan kemitraan dengan stakeholder pendidikan;	5 Meningkatnya Angka siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan/jenjang yang lebih tinggi	APBD II	
			6 Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu;	6 Terlaksananya/terselenggaranya Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dalam mewujudkan Bandung Cerdas 2008;	APBD I & II	
			7 Pemerataan kualitas tenaga kependidikan;	7 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan tingkat menengah;	APBD I, II & APBN	
			8 Pengembangan kepastakaan daerah;	8 Meningkatnya bantuan kepada siswa yang berprestasi	APBD II	
			9 Peningkatan tertib administrasi pendidikan			
			10 Pengembangan kegiatan <i>link and match</i> antara dunia pendidikan dengan dunia industri (DUDI).			
3	Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;	3 Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;	1 Pelaksanaan kejar paket A, B dan C;	1 Meningkatnya potensi diri, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;	APBD I, II & APBN	DINAS PENDIDIKAN
			2 Pembinaan generasi muda			
			3 Pelatihan kegiatan Paskibra, Pramuka, PMR, UKS, Lomba Tata Upacara Bendera dan Pemilihan Siswa Teladan			
			4 Peningkatan kelompok belajar			
			5 Pembinaan pemuda produktif			
			6 Pembinaan kursus-kursus rumpun kesehatan, jasa dan rumah tangga			

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			7 Peningkatan pusat belajar mengajar.			
		4 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	1 Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan-perguruan tinggi;	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur peneliti;	APBD II	KANTOR LITBANG, BAPPEDA, BPM
			2 Diklat teknis peneliti;	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian	APBD II	
			3 Penyusunan rencana pemanfaatan hasil-hasil penelitian	3 Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian.	APBD II	
				4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian	APBD II	
		5 Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;	1 Peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan sanitasi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;	1 Meningkatnya kualitas Sarana Air Bersih (SAB), Jamban keluarga dan rumah sehat dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat;	APBD I/II	DINAS KESEHATAN, BPM
			2 Peningkatan kesadaran perilaku dan pemberdayaan kesehatan serta kebersihan masyarakat;	2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat dan peranserta aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan;	APBD II	
			3 Peningkatan lingkungan perumahan dan permukiman	3 Menurunnya penderita HIV dan AIDS.	APBD II	
			4 Peningkatan kesehatan lingkungan dari sanitasi tempat-tempat umum (TTU), tempat makanan dan minuman (TPM), rumah sakit (RS) dan industri;			
			5 Peningkatan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat;			
			6 Peningkatan pencegahan bahaya NAPZA dan HIV;			
			7 Peningkatan peran serta pria dalam kegiatan KIS	7 Meningkatnya partisipasi pria dalam kis	APBD I/II	BKB
			8 Peningkatan ketahanan keluarga	8 Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm kegiatan ketahanan keluarga	APBD II	BKB
		6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;	1 Pembangunan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan;	1 Menurunnya Angka Kematian Bayi, Ibu Hamil dan melahirkan;	APBD I/II	DINAS KESEHATAN, RSUD UJUNGBERUNG, RSB. ASTANAANYAR, PPKGM
			2 Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan;	2 Menurunnya Angka Kesakitan;	APBD I/II	
			3 Peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis, paramedis dan non medis);	3 Menurunnya Wabah Penyakit Menular;		
			4 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;	4 Menurunnya Angka Kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit		
			5 Pengadaan sarana & prasarana KB	5 Meningkatnya partisipasi dalam kesehatan ber KB	APBD II	BKB
			6 Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan miskin;	6 Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama kepada masyarakat kurang mampu;	APBD I/II dan APBN	
			7 Pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	7 Meningkatnya usaha pelayanan kesehatan masyarakat	APBD I/II	
			8 Pencegahan penyakit melalui imunisasi;	8 Menurunnya status gizi buruk pada bayi & balita.	APBD I/II	
			9 Pemberantasan dan penanggulangan penyakit;			
			10 Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			
			11 Peningkatan status gizi masyarakat			
		7 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya;	1 Pengendalian dan pembinaan penyaluran / Penurunan obat terlarang;	1 Terkendali penyalahgunaan obat terlarang dan NAPZA;	APBD I/II	DINAS KESEHATAN, RSUD UJUNGBERUNG, RSB. ASTANAANYAR, PPKGM
			2 Penanggulangan NAPZA;	2 Terbinanya industri makanan dan minuman		
			3 Pembinaan industri makanan dan minuman			
		8 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;	1 Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan dan tempat kegiatan ibadah;	1 Tersedianya SDM tenaga penyuluh agama yang berkualitas;	APBD I/II	BAGIAN KESRA, DEP. AGAMA
			2 Penyediaan prasarana dan sarana penerangan keagamaan;	2 Terpenuhinya prasarana dan sarana keagamaan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya	APBD I/II	

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
2	Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasis potensi daerah.	9 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	3 Pembinaan pemahaman dan pengamalan kegiatan keagamaan yang telah diperdakan	3 Terwujudnya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan;	APBD I/II	BAGIAN KESRA, DEP. AGAMA
				4 Terwujudnya peran dan partisipasi lembaga keagamaan (Ponpes, DKM, MUI, PGI, Majelis Ta'lim dan lainnya) dalam meningkatkan pemberdayaan umat;	APBD II	
				5 Meningkatnya pelayanan ibadah haji dan pengelolaan pengelolaan zakat;	APBD I & II	
				6 Terwujudnya keluarga yang harmonis;	APBD I & II	
			7 Terwujudnya hubungan sinergis antar lembaga keagamaan dengan pemerintah kota.	APBD I & II		
			1 Penyempurnaan materi pendidikan agama;	1 Tersedianya SDM pendidikan yang berkualitas;	APBD II	
			2 Pemasukan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dengan kurikulum pendidikan;	2 Menurunnya angka kenakalan anak sekolah;	APBD II	
			3 Peningkatan kualitas guru-guru agama	3 Menurunnya pelanggaran etika dan moral yang dilakukan anak sekolah	APBD II	
			4 Peningkatan metode dan proses proses pendidikan agama.	4 Meningkatnya sikap mental anak didik yang baik dalam kehidupan sehari-hari	APBD II	
			1 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;	1 Peningkatan kemampuan SDM pelaku IKM melalui bimbingan teknis dan diklat;	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha industri yang memiliki daya saing serta dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja;	
		2 Peningkatan bantuan biaya operasional IKM (industri kecil dan menengah);	2 Terkendalinya kegiatan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan;			
		3 Pengendalian kegiatan usaha industri melalui administrasi perijinan;	3 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.			
		4 Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; Penataan sentra-sentra industri				
	2 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;	1 Peningkatan jangkauan pemasaran melalui promosi (booklet, leaflet), gelar, temu usaha, pameran, misi dagang serta perluasan informasi pasar melalui jaringan internet	1 Meningkatnya kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan;	APBD I dan II	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KOPERASI	
		2 Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha perdagangan melalui bimbingan teknis dan diklat	2 Meningkatnya kegiatan ekspor;			
		3 Peningkatan pengawasan mutu barang yang beredar;	3 Terpenuhinya ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat yang aman konsumsi dan terjangkau;			
		4 Peningkatan pemantauan/monitoring serta pelayanan informasi harga bagi masyarakat;	4 Terbangunnya sistem informasi perdagangan;			
		5 Pengembangan data base perdagangan dan system informasi pasar;	5 Meningkatnya penataan pada pasar tradisional.			
		6 Pengembangan system distribusi barang dan jasa;				
		7 Pengembangan pola kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar moderen;				
		8 Penataan sentra-sentra perdagangan;				
		9 Pembangunan jaringan system informasi produk-produk unggulan guna mendorong pemasaran local, nasional dan ekspor;				
		10 Peningkatan fasilitas dan utilitas pasar;				
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;	1 Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum para pedagang		DINAS KOPERASI	
			1 Peningkatan dan pemantapan kelembagaan koperasi;	1 Meningkatnya jumlah lembaga koperasi yang aktif;		APBD I dan II
			2 Peningkatan kualitas SDM pembina dan pengurus koperasi	2 Meningkatnya jumlah pemanfaatan modal sendiri pada koperasi		
			3 Peningkatan kemampuan permodalan;	3 Meningkatnya jumlah anggota koperasi		

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		4 Program Pembinaan Usaha Kecil;	4 Pengembangan usaha koperasi. 1 Peningkatan kualitas SDM UKM; 2 Peningkatan akses permodalan; 3 Peningkatan akses/perluasan jangkauan pemasaran 4 Pembinaan teknis bagi usaha kecil; 5 Perluasan jaringan usaha kecil 6 Peningkatan pola kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya	4 Meningkatnya peranan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggotanya; 5 Meningkatnya kesejahteraan anggota. 1 Meningkatnya kemampuan usaha kecil dalam proses produksi dan pemasaran 2 Meningkatnya kemandirian usaha kecil; 3 Meningkatnya daya saing usaha kecil; 4 Meningkatnya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.	APBD	DINAS KOPERASI, BAG. EKONOMI
		5 Program Peningkatan Investasi Kota;	1 Pelayanan prima dalam perijinan investasi; 2 Pelaksanaan kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana kota; 3 Promosi potensi investasi terpadu dan komprehensif melalui pameran di dalam dan luar negeri serta melalui teknologi internet; 4 Deregulasi peraturan perijinan yang mengarah pada system pelayanan prima; 5 Peningkatan kerjasama dalam pengembangan penanaman moda 6 Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal secara berkala dan berkesinambungan; 7 Penyusunan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses 8 Penyusunan peta profil dan basis data investasi berdasarkan prioritas daerah dan prospek pasar.	1 Menurunnya hambatan intern pada investasi kota; 2 Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif; 3 Meningkatnya nilai dan jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing; 4 Terwujudnya sistem informasi potensi investasi; 5 Meningkatnya pelayanan investasi; 6 Meningkatnya daya tarik investasi kota	APBD II	KPMD
		6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	1 Pengkajian pengembangan promosi wisata; 2 Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata; 3 Menggiatkan kegiatan promosi kepariwisataan melalui berbagai media secara nasional dan internasional; 4 Pembangunan jaringan kepariwisataan global secara efektif dan terorganisasi; 5 Pengembangan sistem informasi sarana wisata.	1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara 2 Berkembangnya usaha kepariwisataan 3 Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang kepariwisataan; 4 Meningkatnya usaha pariwisata yg berwawasan lingkungan; 5 Terbangunnya sistem informasi kepariwisataan.	APBD II	DINAS PARIWISATA
		7 Program Pengembangan Produk Kepariwisata;	1 Penyelenggaraan pagelaran kepariwisataan yang bermuansa seni budaya; 2 Pelaksanaan kerjasama dengan pelaku usaha kepariwisataan untuk memenuhi standar umum kepariwisataan.	1 Meningkatnya keragaman obyek wisata; 2 Meningkatnya daya tarik obyek wisata; 3 Terwujudnya penghargaan dan apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian; 4 Tersusunnya inventarisasi & dokumentasi warisan budaya dan seni; 5 Meningkatnya prasarana dan sarana kepariwisataan; 6 Terwujudnya usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	APBD II	DINAS PARIWISATA
		8 Program Peningkatan Agrobisnis.	1 Melakukan peningkatan usaha jasa pertanian; 2 Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan usaha pertanian; 3 Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengelolaan komoditas peternakan/Kesmavet	1 Tersedianya produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan; 2 Tersedianya dan terdistribusikannya kebutuhan produk pertanian yang aman; 3 Meningkatnya penelitian, pengembangan dan jasa perdagangan agrobisnis;	APBD I, II & APBN APBD I, II APBD I, II	DINAS PERTANIAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
3	Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.	1 Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama;	4 Peningkatan inovasi agrobisnis;	4 Meningkatnya kegiatan usaha jasa pertanian;	APBD I, II	BAGIAN KESRA, DEP. AGAMA
			5 Pemberdayaan kegiatan usaha pertanian;	APBD I, II		
			6 Peningkatan prasarana dan sarana usaha pertanian;	APBD I, II & APBN		
			7 Pengembangan sistem informasi dan promosi agrobisnis	APBD II		
			8 Pengembangan kemitraan di bidang usaha agrobisnis	APBD I, II		
			9 Monitoring dan pengendalian mutu produk pertanian.	APBD II		
		1 Pemberian penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat;	1 Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah;	APBD I, II		
		2 Peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dai dan pemuka agama dan agamawan sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama;	2 Terciptanya dasar-dasar kerukunan hidup antarumat dan antara umat beragama;			
		3 Pengembangan materi, metoda dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan;	3 Terwujudnya harmoni sosial, integrasi sosial dan persatuan bangsa;			
		4 Pembinaan kerukunan hidup intern, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah;	Pembinaan kerukunan hidup.			
		5 Pemberdayaan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan				
		6 Peningkatan fungsi dan mutu sarana ibadah di sekolah sebagai pendukung pendidikan karakter/akhlak siswa.				
2 Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan;	1 Pembinaan terhadap fasilitas kesejahteraan	1 Meningkatnya fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan	APBD II	DINAS TENAGA KERJA		
	2 Pengawasan dan pengendalian hubungan industrial	2 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha & pekerja	APBD II			
	3 Penanganan permasalahan ketenagakerjaan	3 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha & pekerja	APBD I, II			
	4 Pengkajian, perumusan & penetapan UMK Kota Bandung tahun 2007	4 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha & pekerja	APBD II			
	5 Bimbingan & penyuluhan ketenagakerjaan	5 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	APBD II			
	6 Intensifikasi pengawasan ketenagakerjaan	6 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	APBD I, II			
	7 Bimbingan teknis tentang hak & kewajiban tenaga kerja perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	7 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	APBD II			
	8 Penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	8 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	APBD II			
3 Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial;	1 Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;	1 Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial;	APBD II	BAGIAN KESRA, KANTOR SOSIAL		
	2 Pengawasan sistem informasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	2 Menurunnya jumlah penduduk miskin;	APBD II			
	3 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;	3 Menurunnya/berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.	APBD I, II			
	4 Memfasilitasi tenaga masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial					
4 Program Pemberdayaan Perempuan;	1 Sosialisasi advokasi tindak kekerasan terhadap perempuan;	1 Meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas keluarga, masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan;	APBD I, II	BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana	
4	Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	5 Program Pelayanan Kependudukan;	2 Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan	2 Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan.	APBD II/BL	DINAS KEPENDUDUKAN	
			3 Pembinaan dan peningkatan kualitas dan peran perempuan	1 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;	APBD II		
			1 Peningkatan sarana penunjang kegiatan pelayanan pendaftaran & pencatatan	2 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;	APBD II		
			2 Intensifikasi pelayanan catatan sipil	3 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;	APBD II		
			3 Peningkatan tertib administrasi kependudukan	4 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;	APBD II		
			4 Intensifikasi penanganan penduduk komuter & pelayanan identitas bagi penduduk jasa KTP di Kota Bandung	5 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;	APBD II		
		6 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;	5 Intensifikasi pengawasan & pengendalian penduduk	6 Terkendalinya penduduk secara alamiah & meningkatnya keluarga sejahtera	APBD II	BKB	
			6 Kepedulian sosial kepada masyarakat tidak mampu di Kota Bandung	7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap LPP alamiah	APBD II		
			7 Pengendalian penduduk secara alamiah	1 Meningkatnya aktivitas kepemudaan yang menunjang perilaku kreatif, inisiatif dan partisipatif dalam pengembangan budaya;	APBD I, II		BAGIAN KESRA, DINAS PENDIDIKAN
			1 Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran pemuda melalui pengembangan dan penyaluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda;	2 Meningkatnya prestasi cabang-cabang olah raga;			
			2 Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan;	3 Meningkatnya atlit-atlit berprestasi.			
			3 Pengembangan faktor pendorong kreasi, kreativitas dan inovasi untuk menunjang perkembangan kepemudaan menjadi satu kekuatan membangun;				
4 Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran olahraga melalui pengembangan dan penyaluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda;							
5 Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan olahraga							
7 Program Pengembangan Seni Budaya Daerah.	6 Pengembangan prestasi olahraga untuk menunjang perkembangan olahraga sebagai salah satu kekuatan membangun	1 Terpelihara dan terlestarikannya seni budaya daerah yang menunjang pengembangan kepariwisataan;	APBD II	DINAS PARIWISATA, DINAS PENDIDIKAN			
	1 Pemberdayaan organisasi atau lembaga-lembaga budaya daerah dalam mengukung kegiatan ataupun forum komunikasi pengembangan seni budaya lokal	2 Terwujudnya dan tergalinya budaya daerah yang dapat mawadahi dan menangkal dampak negatif arus globalisasi					
	2 Penggalan potensi budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional;	3 Meningkatnya sarana dan prasarana seni budaya yang representatif;					
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah;					
		Meningkatnya apresiasi budaya daerah					
1 Program Pengembangan Kawasan Gedebage;	1 Penyusun rencana pengembangan kawasan Gedebage;	1 Tersusunnya rencana pengembangan kawasan Gedebage secara komprehensif.	APBD I, APBN	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA, DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, DINAS BINA MARGA, DINAS PENGAIRAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN.			
	2 Sosialisasi rencana pengembangan kawasan Gedebage	2 Terbangunnya akses tol Gedebage;	APBD II, Swasta				
	3 Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota;	3 Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang/pendukung pengembangan kawasan Gedebage.					

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			4 Pembangunan akses tol Gedebage 5 Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan kawasan Gedebage.			KANTOR PERTANAHAN
		2 Program Penataan Prasarana dan Sarana kota;	1 Penyusunan rencana detail pembangunan over pass dan jalan-jalan baru; 2 Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan 3 Pengendalian pendirian bangunan; 4 Penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 5 Penyusunan rencana penanganan banjir perkotaan; 6 Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan saluran drainase, air limbah, pengairan dan sungai; 7 Pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan infrastruktur lainnya; 8 Pembersihan sungai dan saluran; 9 Penataan dan penertiban ornamen kota; 10 Pengembangan sistem informasi dan forum diskusi dan komunikasi antara jaringan media massa, masyarakat, pelaku wirausaha dan pemerintah.; 11 Pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana pengendalian kebakaran.	1 Tersusunnya desain-desain over pass dan jalan-jalan baru; 2 Meningkatnya kondisi jalan-jalan kota; 3 Meningkatnya kebersihan sungai dan saluran; 4 Meningkatnya pengolahan dan penyediaan air bersih untuk keperluan warga kota; 5 Berkurangnya lokasi-lokasi banjir; 6 Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB; 7 Meningkatnya ketertiban sarana dan ornament kota; 8 Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran	APBD I, II & APBN	DINAS TATA KOTA, DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, DINAS BINA MARGA, DINAS PENGAIRAN, DINAS PASAR, DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		3 Program Pengembangan Penataan Transportasi kota;	1 Penyusunan rencana penanganan transportasi kota; 2 Pengembangan & Penataan Pos & Telekomunikas 3 Pemeliharaan ATCS 4 Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; 5 Sosialisasi dan pendekatan dialogis mengenai tertib berkendara; 6 Pengawasan dan pengendalian lokasi parkir; 7 Penataan dan pengembangan terminal dan sub terminal; 8 Pengembangan system angkutan masal (SAUM).	1 Meningkatnya intensitas pemeliharaan alat-alat pengatur lalu lintas; 2 Berkurangnya kemacetan 3 Tersedianya Terminal angkutan penumpang umum, gedung-gedung dan fasilitas parkir umum 4 Terwujudnya jaringan transportasi untuk pelayanan aksesibilitas yang merata diseluruh wilayah Kota Bandung dengan menggunakan sistem jaringan laba-laba (spider web). 5 Meningkatnya ketertiban jalur transportasi angkutan; 6 Terlaksananya penataan rute angkutan umum dan pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal; 7 Terpeliharanya jaringan jalan kota yang baik; Meningkatnya kerjasama antar unit kerja terkait dalam pengaturan jalur transportasi angkutan;	APBD I, II dan APBN	DINAS PERHUBUNGAN, BAPPEDA, UNIT PENGELOLA PARKIR
		4 Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;	1 Pembinaan dan penyuluhan kegiatan lingkungan hidup; 2 Penertiban dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah 3 Pembuatan sumur resapan dan peningkatan pengelolaan persampahan 4 Peningkatan kali bersih 5 Peningkatan kualitas dan kuantitas taman-taman kota; 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH; 7 Peningkatan penghijauan kota.	1 Terkendalinya pencemaran di bawah tanah, permukaan tanah dan di atas permukaan tanah 2 Meningkatnya prasana dan sarana persampahan 3 Tersedianya prasarana pengolahan alternatif sampah dan limbah; 4 Menurunnya timbulan sampah 5 Meningkatnya kualitas lahan resapan air; 6 Meningkatnya pemahaman, rekomendasi dan perijinan di bidang lingkungan hidup 7 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup; 8 Meningkatnya intensitas pemeliharaan taman-taman kota dan hutan-hutan kota;	APBD I, II dan APBN	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN, DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, PD KEBERSIHAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
5	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota.	5 Program Pengembangan Pemukiman dan Penataan Prasarana dan sarana Linkungan	1 Penyusunan rencana pembangunan Rumah Susun;	9 Meningkatnya upaya-upaya pencegahan pengalihan fungsi RTH; 10 Terwujudnya upaya-upaya proporsi RTH.	APBD I, II, APBN dan Swasta	DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, PD, KEBERSIHAN, PDAM
			2 Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun;	1 Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh;		
			3 Pembangunan Rumah Susun;	2 Meningkatnya kondisi lingkungan permukiman sehat		
			4 Revitalisasi kawasan perkotaan;	3 Meningkatnya jangkauan pelayanan air bersih;		
			5 Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kota	4 Berkembangnya sistem perumahan vertikal dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan		
		6 Program Tata Ruang dan Penata-gunaan Tanah;	1 Penyusunan rencana detail Tata Ruang Kota;	1 Terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan di pusat primer Gedebage;	APBD II	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA, KANTOR PERTANAHAN, DINAS BANGUNAN
			2 Penyusunan "Zoning Regulation";	2 Berkurangnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan;		
			3 Pembuatan prosedur perizinan pemanfaatan ruang kota	3 Meningkatnya proporsi RTH;		
			4 Pembuatan sistem informasi rencana Tata Ruang Kota;	4 Terkendalinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.		
			5 Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.			
		7 Program Pengembangan dan Pengamanan Asset Pemerintah kota.	1 Penyusunan basis data asset pemerintah kota;	1 Terbentuknya basis data aset-aset pemerintah kota;	APBD II	BAGIAN PERLENGKAPAN/DIS PERUM, DISAIR
			2 Pengkajian dan pendayagunaan asset pemerintah kota;	2 Terwujudnya aset pemerintah kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah		
			3 Pengamanan dan pengawasan asset pemerintah kota.			
		1 Program Peningkatan Hukum;	1 Pembinaan tertib hukum dan hak asasi manusia;	1 Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi, potensi daerah dan visi-misi kota;	APBD II	BAGIAN HUKUM, SATPOL PP
			2 Evaluasi terhadap produk-produk hukum agar sesuai dengan dinamika perkembangan kota;	2 Meningkatnya kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat;		
3 Sosialisasi dan pendekatan dialogis produk-produk hukum baik daerah maupun nasional kepada masyarakat;	3 Terwujudnya penegakan hukum secara objektif dan adil;					
4 Pelayanan bantuan hukum dan pembinaan PPNS;	4 Ditetapkannya/disempurnakannya peraturan perundangan daerah yang lebih berkualitas.					
5 Publikasi serta penataan jaringan dokumentasi						
6 Penerbitan naskah akademik						
7 Perumusan dan penerbitan produk hukum.						
2 Program Peningkatan Partisipasi Politik;	1 Pelaksanaan sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang partai politik;	1 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;	APBD I,II	BPM, DISINKOM		
	2 Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2004;	2 Meningkatnya peran partai politik dalam pembangunan kota				
	3 Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Politik;	3 Terjaminnya hak-hak politik masyarakat dalam melakukan partisipasi politiknya, tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun;				
	4 Terfasilitasinya sarana dan prasarana Parpol.	4 Terwujudnya sarana dan prasarana Parpol; 5 Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan tata pemerintahan yang baik.				
3 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintah;	1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah kota.	1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.	APBD II	ASISTEN TATA PRAJA, BAG. UMUM, PERLENGKAPAN, DPPK, Satpol PP		

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		4 Program Peningkatan Perencanaan Kota;	1 Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah; 2 Menyusun Program Pembangunan Daerah; 3 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah; 4 Menyusun perencanaan umum pembangunan kota	1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2 Tersusunnya perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program kerja tahunan daerah 3 Tersusunnya rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota 4 Tersusunnya perencanaan umum pembangunan fisik dan non fisik yang meliputi bidang Sosial Budaya, Ekonomi & Fisik dan Prasarana	APBD II	BAPPEDA
		5 Program Pengembangan Aparatur Pemerintah	1 Melakukan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah kota 2 Membuat sistem informasi kepegawaian kota 3 Melakukan analisis jabatan fungsional dan struktural. 4 Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur	1 Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelayanan publik 2 Meningkatnya persentasi tingkat produktivitas kerja PNS; 3 Tersedianya standar penilaian kinerja aparatur; 4 Meningkatnya profesionalisme aparatur yang mendorong jiwa kewirausahaan aparat; 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat 6 Meningkatnya kesejahteraan pegawai pada aparatur di lingkungan pemerintah kota; 7 Terpenuhiya prosedur administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	APBD II	ASISTEN TATA PRAJA, KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN, BAGIAN KEPEGAWAIAN, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, DPPK, SATPOL PP, KECAMATAN
		6 Program Pelayanan Prima;	1 Penyusunan petunjuk operasional dan prosedur tetap pelayanan perijinan; 2 Pembangunan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat.	1 Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah kota; 2 Berkurangnya waktu pelaksanaan prosedur perijinan.	APBD I, II	ASISTEN TATA PRAJA, UNIT YANTAP, KPDE, DISINKOM, PUSARDA, SETWAN, KECAMATAN
		7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan kota;	1 Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota yang berhubungan dengan pengaturan arus masuk-keluar kendaraan; 2 Penjajagan kerjasama dengan kota lain; 3 Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan kabupaten-kota; 4 Peningkatan kerjasama yang bersifat inovatif dengan kabupaten-kota lain; 5 Kerjasama pembangunan prasarana kota di batas-batas wilayah kota-kabupaten.	1 Meningkatnya peran pemerintah kota dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom; 2 Meningkatnya kerjasama antar lembaga Pemerintah dan non pemerintah. 3 Meningkatnya kerjasama dengan kota-kota di luar negeri 4 Berkurangnya permasalahan yang terjadi di batas wilayah	APBD II	BPOD
		8 Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;	1 Pengkajian atas kinerja dinas, badan, dan lembaga teknis daerah atas dasar kewenangan yang dimilikinya; 2 Penyusunan panduan tentang prosedur kerja bagi setiap unit kerja; 3 Penyusunan sistem kerja bagi setiap unit kerja; 4 Pengumpulan dan pemutakhiran database seluruh pegawai pada satuan unit kerja di lingkungan perangkat daerah pemerintah kota; 5 Pengumpulan dan pemutakhiran sistem dan data-data peraturan perundangan kelembagaan pemerintah kota.	1 Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah kota; 2 Terbentuknya organisasi pemerintah kota sesuai dengan kewenangan; 3 Terwujudnya sistem kerja perangkat daerah yang efisien dan efektif; 4 Terwujudnya prosedur kerja yang baku bagi seluruh perangkat daerah.	APBD II	BPOD, BAG. ORGANISASI
		9 Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;	1 Pembinaan secara intensif terhadap aparatur pengawasan; 2 Penyusunan rencana kegiatan pengawasan yang terintegrasi dengan unit pengawasan lainnya	1 Tersedianya aparatur pengawasan yang handal, bersih, berwisata dan profesional; 2 Berkurangnya kasus yang berindikasi KKN;	APBD II	BAWASDA

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		10 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	<p>3 Pengawasan secara intensif dan pengawasan secara fungsional</p> <p>4 Penyusunan standar kerja aparatur pengawasan.</p> <p>1 Penataan PKL;</p> <p>2 Pelaksanaan operasional penertiban pelanggar Perda tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan yang mengandung sanksi & Perda K3</p> <p>4 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>5 Pelaksanaan sidang yustisi dan pendataan terhadap para pelanggar Perda.</p>	<p>3 Tersedianya standar pengawasan yang efektif dan efisien;</p> <p>4 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran</p> <p>5 Menurunnya jumlah uang yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi</p> <p>6 Meningkatnya persentase instansi dan aparat pemerintah yang melaksanakan akuntabilitas kinerja (AKIP) secara transparan;</p> <p>7 Terwujudnya sistem pengawasan yang terkoordinasi dengan aparat pengawasan lainnya berdasarkan asas kesetaraan.</p> <p>1 Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan;</p> <p>2 Berkurangnya gangguan ketertiban umum;</p> <p>3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;</p> <p>4</p> <p>5 Meningkatnya peran SatPol PP dan PPNS dalam menegakkan Perda.</p>	APBD II	SATPOL PP, BPM, KECAMATAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
6	Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kota.	1 Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan;	1 Pengembangan sistem komputerisasi untuk pemutakhiran data; 2 Pensosialisasian pajak dan retribusi daerah; 3 Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah; 4 Pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien; 5 Pengembangan sistem pembiayaan pembangunan kota	1 Tersusunnya APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2 Meningkatnya pendapatan keuangan kota dari berbagai sumber.	APBD II	DIPENDA, BAG. KEUANGAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		2 Program Peningkatan Kinerja BUMD;	1 Perbaikan tarif jasa pelayanan perusahaan-perusahaan daerah 2 Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan-perusahaan daerah 3 Peningkatan laba perusahaan daerah	1 Meningkatnya pelayanan perusahaan-perusahaan daerah 2 Meningkatnya laba perusahaan-perusahaan daerah	APBD II	BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA
		3 Program Peningkatan dan pengembangan Kemitraan.	1 Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana kota.	1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota. 2 Meningkatnya sumber-sumber keuangan kota.	APBD II	BAGIAN EKONOMI, BPOD

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

MAMAN SUPARMAN